

ASSESSING THE EFFICACY OF FISCAL POLICY IN SUPPORTING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF THE IMPACT OF KITE IKM FACILITATION ON EXPORT VALUE FOR SMEs IN INDONESIA

Siti Arifa'atus Sa'adah

Siti.saadah@kemenkeu.go.id

Directorate General of Customs and Excise

Lilis Nurul Husna

Lilishusna@gmail.com

Statistics Indonesia

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia, berkontribusi lebih dari 61% dari total PDB, dengan lebih dari 64,2 juta perusahaan mempekerjakan 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi signifikan ini menempatkan UKM sebagai pemain penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk membangun pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk mendorong pengembangan UKM, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan fiskal, antara lain KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), kemudahan impor untuk tujuan ekspor khusus untuk usaha kecil dan menengah. Fasilitas KITE IKM memberikan insentif pajak yang terdiri dari pembebasan pajak bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang impor. Studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal tersebut, terutama berfokus pada dampak kebijakan IKM KITE terhadap kinerja ekspor. Dengan memanfaatkan model Vector Autoregression (VAR), penelitian ini menilai hubungan kausal antara fasilitas IKM KITE, nilai tukar, dan nilai ekspor. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fasilitas KITE IKM tidak memiliki efek kausal langsung terhadap nilai ekspor, terutama karena rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas untuk impor bahan yang digunakan dalam produksi ekspor. Namun, nilai tukar mata uang asing secara signifikan memengaruhi nilai impor dan ekspor. Terlepas dari insentif pajak yang diberikan melalui bea masuk dan pembebasan pajak, langkah-langkah ini tidak berhasil meningkatkan ekspor secara signifikan. Beberapa tantangan, seperti terbatasnya kesadaran dan pemahaman di antara operator, serta kerangka peraturan yang kompleks, dapat menghambat pemanfaatan penuh fasilitas KITE IKM. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan KITE IKM merupakan alat yang berguna untuk mendukung kegiatan ekspor UKM, dampaknya tetap minimal. Untuk membuka potensi penuh UKM, pemerintah harus meningkatkan implementasi kebijakan, meningkatkan upaya

penjangkauan, dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih baik dalam program kebijakan fiskal.

Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in Indonesia's national economy, contributing over 61% of the total GDP, with more than 64.2 million enterprises employing 97% of the national workforce. This significant contribution positions SMEs as vital players in achieving the Indonesia Emas 2045 vision, which aims to build sustainable economic development aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). To promote SMEs development, the government has implemented several fiscal policies, including KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), an ease imports for export purposes exclusively for small and medium enterprises. The KITE IKM facility provides tax incentives comprised of an exemption of import duty tax, value-added tax, and sales tax on luxury goods for imported goods. This study evaluates the effectiveness of these fiscal policies, particularly focusing on the KITE IKM policy's impact on export performance. Utilizing a Vector Autoregression (VAR) model, the research assesses the causal relationships between the KITE IKM facility, exchange rates, and export values. The results reveal that the KITE IKM facility does not have a direct causal effect on export values, primarily due to the low utilization rate of the facility for importing materials used in export production. However, foreign exchange rates significantly affect both import and export values. Despite the tax incentives provided through import duty and tax exemptions, these measures have not succeeded in significantly boosting exports. Several challenges, such as limited awareness and understanding among operators, as well as complex regulatory frameworks, may hinder the full utilization of the KITE IKM facility. The study concludes that while the KITE IKM policy is a useful tool for supporting SME export activities, its impact remains minimal. To unlock the full potential of SMEs, the government must enhance policy implementation, improve outreach efforts, and ensure better stakeholder engagement in fiscal policy programs.

Kata Kunci: *SMEs, KITE IKM, pembebasan bea masuk, kebijakan fiskal*